

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dibanyak negara menjadi agenda prioritas dalam setiap kehidupan pemerintahan. Pembangunan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan serta kesejahteraan terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pembangunan pada umumnya dilakukan diberbagai sektor kehidupan yang melibatkan proses produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi diperuntukkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegi ekonomi dan sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu menciptakan kesempatan atau lapangan kerja seluas-luasnya supaya angkatan kerja dalam suatu wilayah tersebut dapat terserap dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu menciptakan pertumbuhan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Dewasa ini sebagai negara berkembang, pengangguran (*unemployment*) merupakan masalah ketenagakerjaan paling krusial di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian. Lambatnya penanganan akan persoalan pengangguran dapat berdampak pada kerawanan sosial serta berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

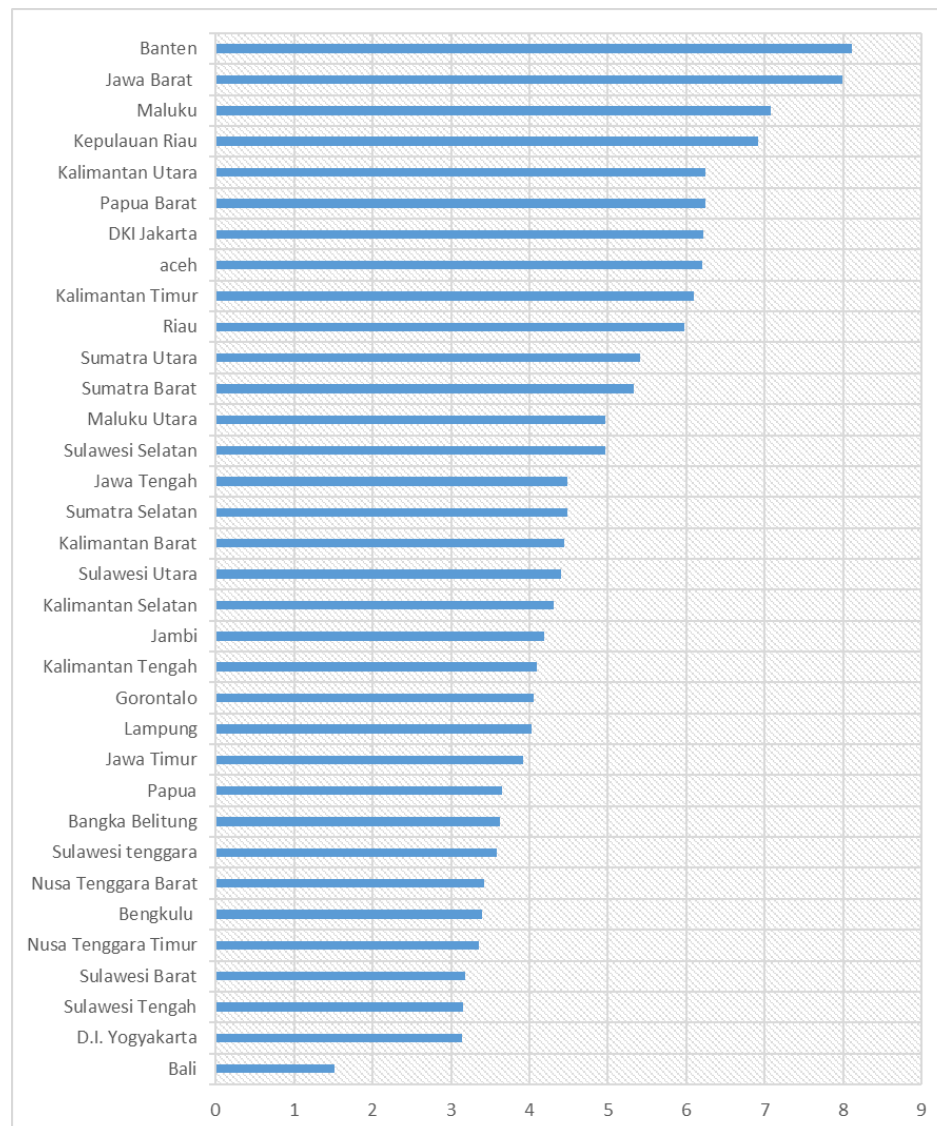
Selain itu problematika ini sudah selayaknya memperoleh perhatian yang serius, sebab masalah pengangguran ini berimplikasi pada merosotnya pendapatan, daya beli masyarakat dan penurunan produktivitas. Sehubungan dengan itu, meningkatnya pengangguran secara langsung mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang serius, seperti peningkatan tindak kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas politik negara.

Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan akibat dari situasi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang ada. Fenomena ini juga dapat diterjemahkan sebagai minimnya ketersediaan jumlah lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Selain itu pengangguran juga dapat diakibatkan karena kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja, kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

Fenomena pengangguran merupakan paradoks bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia. Pasalnya pada beberapa priode terakhir ini Indonesia masih memiliki jumlah tingkat pengangguran yang cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya terjadi penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka dari agustus 2015 sampai dengan agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,90 persen pada titik 5,28 persen.

Permasalahan pengangguran juga terjadi di Jawa Timur. Dapat kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat produk domestik regional bruto tertinggi dibandingkan beberapa

provinsi lainnya. Badan pusat statistik pada tahun 2019 mencatat bahwa Jawa Timur memiliki PDRB atas harga berlaku terbesar kedua setelah provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian Jawa Timur dengan tingkat PDRB yang tinggi masih belum terlepas dari tingginya tingkat pengangguran yang ada.



Gambar 1.1.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Provinsi 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik

BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 berada pada posisi 11 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dalam posisi ini, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur lebih besar daripada 10 provinsi lainnya yaitu ; Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi tengah, Sulawesi Barat, NTT, Bengkulu, NTB, Sulawesi Tenggara, Bangkabelitung, dan Provinsi Papua. Selain itu BPS tahun 2019 juga mencatat bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi kedua terbesar setelah Provinsi Jawa Barat yaitu 835.130 jiwa. Dalam posisi ini memperlihatkan bahwa tingginya nilai PDRB Jawa Timur masih belum mampu mengatasi banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Berdasarkan hal ini besarnya tingkat PDRB yang dimiliki Provinsi Jawa Timur tidak serta merta menjadikannya daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur no 5 tahun 2011 tentang rencana aksi daerah tenaga kerja (RAD-TK) tahun 2011 – 2014, Pemprov telah serius berbicara perihal masalah ketenagakerjaan salah satu didalamnya yaitu tentang pengangguran. Salah satu is strategis yang dicanangkan yaitu menggalang usaha penciptaan kesempatan kerja dengan mengembangkan pasar tenaga kerja dari sisi permintaan. Aksi ini meliputi upaya menarik investasi dan pembentukan wirausaha baru. Untuk mendukung upaya ini dalam mengendalikan laju pengangguran, diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan membantu proses perumusan kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran di Jawa Timur.

Secara Umum berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum Kabupaten/kota (UMK), investasi dan pendidikan. Menurut Muslim (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu ; laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, studi dan pengeluaran pemerintah. Selain itu menurut Ratha (2018) berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu ; pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan.

Menurut Muslim (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan PDRB dapat menstimulus peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut.

Menurut Ratha dan Rustariyuni (2018) selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kabupaten/kota (UMK) juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Tinggi rendahnya tingkat upah minimum Kabupaten/kota (UMK) secara langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi dan akan berdampak pada pengurangan atau penambahan tenaga kerja. Dalam artian apabila upah minimum Kabupaten/kota (UMK) mengalami kenaikan maka untuk melakukan efisiensi biaya produksi perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah pengangguran.

Selain itu tinggi rendahnya tingkat pengangguran disuatu wilayah juga tidak terlepas dari peran pendidikan yang ada. Menurut Ratha and Rustariyuni (2018) semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka kemampuan dan keterampilan yang dipunyai juga akan lebih berkembang, sehingga hal ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar kerja, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran.

Selain itu sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pengangguran bahkan sampai level kabupaten, namun masih jarang yang memasukkan peran lembaga pelatihan kerja sebagai faktor yang turut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Disnakertans Jatim (2019) lembaga pelatihan kerja berperan penting dalam pengembangan tenaga kerja professional melalui pendidikan dan pelatihan. Lembaga pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum mampu untuk menjawab tingginya tingkat pengangguran terbuka yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang berada pada posisi 11 dari 34 provinsi yang beberapa diantaranya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah.

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur no 5 tahun 2011 tentang rencana aksi daerah tenaga kerja (RAD-TK) tahun 2011 – 2014, Pemprov telah serius berbicara perihal masalah ketenagakerjaan salah satu didalamnya yaitu

tentang pengangguran. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan membantu proses perumusan kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran di Jawa Timur. Berdasarkan hal itu maka sudah selayaknya ada studi yang menelaah lebih lanjut permasalahan ini. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan judul “Analisis Determinan Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai :

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
2. Seberapa besar pengaruh tingkat UMR terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
3. Seberapa besar pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
4. Seberapa besar pengaruh Balai Latihan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh UMR daerah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Balai Latihan Kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepastakaan ilmu sosial terutama ilmu perencanaan pembangunan serta menjadi wadah penerapan ilmu yang diperoleh pada bangku pendidikan perguruan tinggi untuk menganalisis keadaan nyata di lapangan.
2. Untuk praktisi, penelitian ini diharapkan berguna bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Ketenagakerjaan sebagai bahan masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran terkhusus pada sektor tenaga kerja.
3. Untuk umum, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan tambahan informasi atau pembandingan bagi pihak lain yang ingin meneliti hal yang sama.